

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**DINAS PERTANIAN**

**Komplek Perkantoran Cimaja – Jl. Raya Cisolok Km. 10**

**Telp (0266) 436407 – 436408 Cisolok, Palabuhanratu - Sukabumi**

# Renja Perubahan 2023 Dinas Pertanian

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2023 yang merupakan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan 2023 dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada Rencana Strategis, dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau di TW II. Renja Kerja Perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 masih banyak kekurangan, oleh karenanya masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan pembangunan pertanian bagi Dinas Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi



Palabuhanratu, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Sukabumi,

**SRI HASTUTY HARAHAP, SP, MSE, MA**  
**NIP. 19741019 199903 2 008**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1. Maksud dan Tujuan</b> .....	1
<b>1.1.1. Maksud</b> .....	1
<b>1.1.2. Tujuan</b> .....	1
<b>1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan</b> .....	2
<b>1.3. Sistematika Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah</b> .....	7
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	8
<b>2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran</b> .....	8
<b>2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan</b> .....	9
III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) .....	15
<b>PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023</b> .....	15
IV. PENUTUP.....	22

## DAFTAR TABEL

Table 1. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Dinas Pertanian pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi.....	3
Table 2. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 .....	88
Table 3. Program, Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tri. II Tahun 2023.....	9
Table 4. Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja s.d Tri II tahun 2023.....	1010
Table 5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023.....	17

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Maksud dan Tujuan

### 1.1.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pertanian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan, sebagai implementasi dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang merupakan cerminan dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

### 1.1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perangkat Daerah;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
- f. Meningkatkan peran pengawasan internal Dinas Pertanian dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi.

- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Kebijakan Pengawasan Internal
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Sukabumi No : 000.7.4.2/5150/Bappelitbangda/2023 Tanggal 5 Juli 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Misi Bupati – Wakil Bupati Sukabumi periode 2021 – 2026 yang terkait dengan Urusan Pilihan Pertanian yaitu Misi ke 2 “**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata**”

**Berkelanjutan**". Sasaran dari Misi tersebut adalah **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan”** dan dengan prioritas Pembangunannya adalah **“Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah”**.

Berikut disajikan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Dinas Pertanian pada prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.

**Table 1 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Dinas Pertanian pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi**

<b>Prioritas Pembangunan</b>	Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan
<b>Indikator Sasaran</b>	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan (persen)
<b>Target 2023</b>	2,30 – 3,30%
<b>Strategi</b>	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan
<b>Arah Kebijakan</b>	Ekstensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan (Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian)
	Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis (Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian)
	Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi Agribisnis (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)
	Mencetak agriprenuer milenial yang potensial (Program Penyuluhan Pertanian)

Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Pertanian Tahun 2023 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang mengkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);
24. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 No. 85);
25. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
27. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.118-Dipertan/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023.

### **1.3. Sistematika Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Sistematika Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.4.

#### **BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tabel 3.1

#### **BAB IV. PENUTUP**

## II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

### 2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Pertanian Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan melalui Sektor Pertanian dan Perikanan yang diukur dengan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan Target 2,3 – 3.3 % untuk Tahun 2022 terrealisasi 5,4% dengan kontribusi PDRB sektor Pertanian sebesar 22,61%.
2. Untuk Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi “Peningkatan Produksi Pertanian” ditargetkan 2% setiap tahun periode 2021 – 2026, pada Tahun 2022 tercapai 6,60%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian selama Tahun 2022 sudah dapat merelaisasikan target produksi yang telah ditetapkan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dibawah ini kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 :

**Table 2. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2022**

Sasaran Dinas Pertanian	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2,30 - 3,30%	5,40%	Tahun 2022 Indikator Kinerja Kepala Daerah di Sektor Ekonomi dan SDA yaitu LPE tercapai 5,45% dengan kontribusi PDRB dari sektor pertanian sebesar 22,61% (data : BPS, Kabupaten Sukabumi dalam Angka Tahun 2023)
Meningkatnya Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	2%	6,60%	Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian tercapai melebihi target. Penghitungan berdasarkan pada produksi yang dihasilkan selama Tahun 2022 pada 15 komoditas strategis yang berpengaruh

Sasaran Dinas Pertanian	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
				terhadap inflasi dan merupakan unggulan Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Terhadap sasaran program, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 melaksanakan 5 Program dengan sasaran seperti terlihat pada Tabel di bawah ini :

**Table 3. Program, Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tri. II Tahun 2023**

Program	Indikator Sasaran Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tri II Tahun 2023
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	100	196,70	100	13,79
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	100	145,38	100	38,06
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi	100	54,55	100	6,87
Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha Pertanian	100	90,00	100	59,39
Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	138,89	100	27,42

## 2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan Visi Misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 30 Juni 2023) Tahun 2023 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**Table 4. Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja s.d Tri II tahun 2023**

Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah</b>	<b>24.549.733.446</b>	<b>14.250.500.578</b>	<b>100%</b>	<b>58,05%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah</b>	<b>282.196.200</b>	<b>131.229.500</b>	<b>100%</b>	<b>46,50</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.676.200	61.168.000	1 Dokumen	50,69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	19.920.000	1 Dokumen	99,60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	0,00	1 Dokumen	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.000.000	19.320.000	1 Dokumen	96,60
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	0,00	1 Dokumen	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	13.335.000	1 Laporan	53,34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.520.000	17.486.500	1 Laporan	26,29
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.490.560.246</b>	<b>18.490.560.246</b>	<b>100%</b>	<b>60,60</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.450.560.246	11.184.755.512	217 Orang / Bulan	60,62
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	3.952.000	1 Dokumen	39,52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	1 Laporan	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	4.100.000	1 Laporan	41,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	2.950.000	1 Dokumen	30
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>11.414.000</b>	<b>100%</b>	<b>29</b>
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	3.650.000	1 Laporan	73
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	7.764.000	1 Laporan	22

Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>149.600.000</b>	<b>70.221.000</b>	<b>100%</b>	<b>46,94</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	7.121.000	50 Orang	14
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.600.000	63.100.000	50 Orang	63,35
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>837.100.100</b>	<b>360.478.891</b>	<b>100%</b>	<b>43,06</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.998.300	4.998.300	1 Paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	416.470.000	210.489.800	1 Paket	50,54
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11.936.800	1.764.000	1 Paket	14,66
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	28.000.000	12.930.000	1 Dokumen	46,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.695.000	130.296.791	1 Laporan	35,73
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.000.000	0	1 Dokumen	0,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>391.142.400</b>	<b>198.830.000</b>	<b>100%</b>	<b>50,83</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62.369.600	0	1 Unit	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250.772.800	198.830.000	20 Unit	79
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	78.000.000	0	150 Unit	0,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>2.865.258.500</b>	<b>1.458.531.365</b>	<b>100%</b>	<b>50,90</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	153.000.000	78.300.000	1 Laporan	51
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	737.000.000	1.083.529.266	1 Laporan	54,86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.975.258.500	296.702.099	1 Laporan	40,26
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.493.776.000</b>	<b>814.038.310</b>	<b>100%</b>	<b>54,50</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	333.450.000	149.244.910	6 Unit	44,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130.650.000	82.764.800	15 Unit	63,35

Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
Dinas Operasional atau Lapangan					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21.400.000	5.710.000	10 Unit	26,68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.008.276.000	576.318.600	55 Unit	57,16
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh petani</b>	<b>6.477.704.900</b>	<b>893.596.677</b>	<b>100%</b>	<b>13,70%</b>
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Sarana Pertanian	5.957.704.900	499.730.677	1 Dokumen	
SubKeg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.837.704.900	302.898.400	1 Laporan	
SubKeg. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.120.000.000	196.832.277	1 Laporan	
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	520.000.000	393.866.000	1 Dokumen	
SubKeg. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	520.000.000	393.866.000	1 VUB	
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani</b>	<b>56.490.878.000</b>	<b>21.498.419.000</b>	<b>100%</b>	<b>38,06%</b>
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.197.878.000	164.220.000	1 Dokumen	
SubKeg. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	745.000.000	159.820.000	1 Dokumen	
SubKeg. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	45.000.000	0	1 Dokumen	
SubKeg. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	407.878.000	4.400.000	1 Laporan	
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	55.293.000.000	21.334.199.000	1 Dokumen	
SubKeg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	39.000.143.000	17.135.963.000	154 Unit	
SubKeg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1.119.997.000	200.380.000	17 Unit	
SubKeg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13.724.822.000	3.693.563.950	22 Unit	

Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
SubKeg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	650.000.000	208.969.050	17 Unit	
SubKeg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	798.038.000	95.323.000	8 Unit	
<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi</b>	<b>156.575.000</b>	<b>10.762.200</b>	<b>100</b>	<b>6,87%</b>
<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	<i>156.575.000</i>	<i>10.762.200</i>	<i>1 Dokumen</i>	
SubKeg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23.245.000	7.831.200	90 Ha	
SubKeg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	33.500.000	1.854.000	90 Ha	
SubKeg. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10.938.000	726.000	25 Ha	
SubKeg. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	88.892.000	351.000	1 Dokumen	
<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Persentase Fasilitasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>115.000.000</b>	<b>68.302.000</b>	<b>100</b>	<b>59,39%</b>
<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>115.000.000</i>	<i>68.302.000</i>	<i>1 Dokumen</i>	
SubKeg. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	15.000.000	15.000.000	1 Dokumen	
SubKeg. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5.000.000	5.000.000	1 Dokumen	
SubKeg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	95.000.000	48.302.000	1 Laporan	
<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani</b>	<b>4.366.100.100</b>	<b>1.197.385.350</b>	<b>100</b>	<b>27,42%</b>
<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>4.366.100.100</i>	<i>1.197.385.350</i>	<i>1 Dokumen</i>	
SubKeg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.853.020.100	871.810.500	47 Unit	
SubKeg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100.000.000	39.294.000	144 Unit	
SubKeg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	1.413.080.000	286.280.850	58 Unit	

Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pertanian				
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>92.155.891.446</b>	<b>37.918.965.805</b>		

Berdasarkan table di atas, Realisasi anggaran Dinas Pertanian sampai dengan Juni 2023 (semester 1) adalah Rp 37.918.965.805 atau sekitar 41,15% dari pagu anggaran Rp 92.155.891.446.

Dengan realisasi keuangan mencapai 41,15% pada Semester 1 Tahun 2023, capaian fisik dapat di rata-ratakan 33,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian baik dari sisi keuangan maupun fisik pada pertengahan Tahun 2023 belum optimal. Dari total pagu anggaran Rp 92.155.891.446, sumber anggaran yang berasal dari DAK Fisik Penugasan Tahun 2023 sebesar 16,13% atau sekitar Rp 14.865.705.000,- dan sampai dengan Tri II, DAK Fisik belum terealisasi. Sehingga hal inipun mempengaruhi realisasi keuangan, realisasi fisik dan imbasnya berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pertanian. Selain itu pada semester 1, pekerjaan fisik sebagian besar masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian dilapangan. Namun ada pula yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga pekerjaan fisik dilapangan belum bisa dilaksanakan.

### **III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Rencana program dan kegiatan Perubahan Dinas Pertanian yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2023 diarahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pertanian Tahun 2023 berisi program dan kegiatan yang prioritas, baik untuk mencapai secara langsung tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi.

Strategi dalam pencapaian output dan outcome Tahun 2023, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2023 melaksanakan beberapa program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri 2 kegiatan dengan 8 sub kegiatan, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan, Program Perijinan Usaha Pertanian sebanyak 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah terdiri dari 8 kegiatan dengan 33 sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 berdasarkan rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp 4.671.807.625,- atau 5,07% dari anggaran murni Rp 92.155.891.446,- menjadi Rp 96.827.699.071,-. Perubahan anggaran ini berdasarkan urgensinya antara lain adalah :

1. Penambahan belanja pegawai untuk subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 1.882.468.225,- dikarenakan kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK.
2. Penambahan sebesar Rp 434.677.100 untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan urgensi untuk

pengadaan alat-alat mesin kantor salah satunya adalah kebutuhan scanner, laptop, printer di setiap bidang dan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) untuk kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan.

3. Penambahan anggaran untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 162.162.300,- diperuntukkan bagi honorarium Non ASN yang sebelumnya hanya tersedia 12 Bulan dan kekurangan 1 Bulan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya Non ASN.
4. Penambahan anggaran sebesar Rp 387.078.000,- untuk Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan urgensi untuk mendanai fasilitasi pelaksanaan KP3 (komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dan fasilitasi pendataan Statistik Pertanian yang belum teranggarkan pada anggaran murni.
5. Penambahan anggaran sebesar Rp 1.691.422.000,- untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang dibagi menjadi 2 yaitu Rp 920.000.000 di Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Rp 771.422.000,- di Subkeg. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan usaha Tani.
6. Penambahan anggaran sebesar Rp 114.000.000,- di Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan urgensi untuk mendanai kegiatan demi pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023**

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		SELISIH
				MURNI	PERUBAHAN	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24.549.633.446</b>	<b>27.028.941.071</b>	<b>2.479.307.625</b>
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>282.196.200</b>	<b>282.196.200</b>	<b>0</b>
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	120.676.200	120.676.200	0
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	0
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	0
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	0
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	66.520.000	66.520.000	0
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>18.490.560.246</b>	<b>20.373.028.471</b>	<b>1.882.468.225</b>
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 Orang / Bulan	18.450.560.246	20.333.028.471	1.882.468.225
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	0
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	0
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		SELISIH
				MURNI	PERUBAHAN	
<b>3.27.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>
3.27.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	0
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	0
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	149.600.000	149.600.000	0
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50.000.000	50.000.000	0
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	99.600.000	99.600.000	0
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>837.100.100</b>	<b>837.100.100</b>	<b>0</b>
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.998.300	4.998.300	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	416.470.000	416.470.000	0
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.936.800	11.936.800	0
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	28.000.000	28.000.000	0
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	364.695.000	364.695.000	0
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	11.000.000	11.000.000	0
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>391.142.400</b>	<b>825.819.500</b>	<b>434.677.100</b>
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	361.070.600	361.070.600
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	62.369.600	62.369.600	0
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	250.772.800	324.379.300	73.606.500
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	78.000.000	78.000.000	0
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.865.258.500</b>	<b>3.027.420.800</b>	<b>162.162.300</b>
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	153.000.000	153.000.000	0

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		SELISIH
				MURNI	PERUBAHAN	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	737.000.000	737.000.000	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.975.258.500	2.137.420.800	162.162.300
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.493.776.000	1.493.776.000	0
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	333.450.000	333.450.000	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	130.650.000	130.650.000	0
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	21.400.000	21.400.000	0
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit	1.008.276.000	1.008.276.000	0
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan oleh Petani</b>	<b>100%</b>	<b>6.477.704.900</b>	<b>6.864.782.900</b>	<b>387.078.000</b>
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Sarana Pertanian</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>5.957.704.900</b>	<b>6.344.782.900</b>	<b>387.078.000</b>
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.837.704.900	3.916.204.900	78.500.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	2.120.000.000	2.428.578.000	308.578.000
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>520.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>0</b>
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	520.000.000	520.000.000	0
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh Petani</b>	<b>100%</b>	<b>56.490.878.000</b>	<b>58.182.300.000</b>	<b>1.691.422.000</b>
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.197.878.000</b>	<b>1.197.878.000</b>	<b>0</b>
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	745.000.000	745.000.000	0

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		SELISIH
				MURNI	PERUBAHAN	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	1 Dokumen	45.000.000	45.000.000	0
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	407.878.000	407.878.000	0
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>55.293.000.000</b>	<b>56.984.422.000</b>	<b>1.691.422.000</b>
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	154 Unit	39.000.143.000	39.920.143.000	920.000.000
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	17 Unit	1.119.997.000	1.119.997.000	0
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	22 Unit	13.724.822.000	14.496.244.000	771.422.000
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	17 Unit	650.000.000	650.000.000	0
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	798.038.000	798.038.000	0
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang di Fasilitas</b>	<b>100%</b>	<b>156.575.000</b>	<b>156.575.000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>156.575.000</b>	<b>156.575.000</b>	<b>0</b>
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	90 Ha	23.245.000	23.245.000	0
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	90 Ha	33.500.000	33.500.000	0
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	10.938.000	10.938.000	0
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	88.892.000	88.892.000	0
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>115.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>115.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>0</b>

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		SELISIH
				MURNI	PERUBAHAN	
3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	95.000.000	95.000.000	0
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>100%</b>	<b>4.366.100.100</b>	<b>4.480.100.100</b>	<b>114.000.000</b>
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>4.366.100.100</b>	<b>4.480.100.100</b>	<b>114.000.000</b>
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	2.853.020.100	2.967.020.100	114.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	144 Unit	100.000.000	100.000.000	0
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	58 Unit	1.413.080.000	1.413.080.000	0
<b>Jumlah</b>				<b>92.155.891.446</b>	<b>96.827.699.071</b>	<b>4.671.807.625</b>

## IV. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 (*Cut Off* 30 Juni 2023) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga Perangkat Daerah termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 berdasarkan rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp 4.671.807.625,- atau 5,07% dari anggaran murni Rp 92.155.891.446,- menjadi anggaran perubahan Rp 96.827.699.071,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.



Palabungratu, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Sukabumi,

**SRI HASTUTY HARAHAP, SP, MSE, MA**  
**NIP. 19741019 199903 2 008**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 00.7.2.6/Kep.711-Bappeltbangda/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

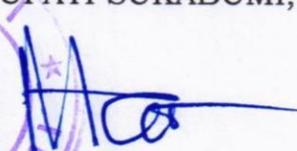
**BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV : PENUTUP**

**KETIGA** : Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan angka yang bersifat indikatif yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI SUKABUMI,  
  
MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 00.7.2.6 / Kep.711 - Bappeltbangda / 2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

PERIHAL : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023**

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023;
4. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023;
5. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023;
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2023;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2023;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2023;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2023;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2023;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023;

25. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
26. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
27. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023;
28. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023;
29. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2023;
30. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2023;
31. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2023;
32. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023;
33. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;
34. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023;
35. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2023;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2023;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2023;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2023;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2023;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2023;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2023;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2023;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2023;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2023;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2023;
48. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2023;
49. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2023;
50. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023;
51. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2023;
52. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2023;
53. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2023;
54. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2023;
55. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2023;
56. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikebar Tahun 2023;
57. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2023;
58. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2023;
59. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2023;
60. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2023;
61. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2023;
62. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2023;
63. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2023;
64. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2023;
65. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2023;
66. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lengkung Tahun 2023;
67. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2023;

68. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2023;
69. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2023;
70. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2023;
71. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2023;
72. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2023;
73. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2023;
74. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2023;
75. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2023;
76. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2023;
77. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2023;
78. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2023;
79. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2023;
80. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegallbuleud Tahun 2023;
81. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2023;
82. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2023.



BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI